

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam struktur perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2025, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 14,35 persen sehingga menjadikan sektor tersebut sebagai kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian nasional dan juga sebagai penggerak utama ekonomi rakyat (Kementerian Pertanian R.I, 2025). Selain itu, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ini juga menjadi penyumbang penyerapan tenaga kerja terbanyak dengan kontribusi sebesar 28,15 persen (AntaraNews, 2025). Lebih lanjut, sebagai pilar ketahanan pangan nasional, sektor ini juga bertanggung jawab dalam penyediaan pangan bagi kebutuhan domestik (Andoko, E., *et al.*, 2025). Namun, dalam menjalankan peran tersebut, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam penyediaan *input* produksi, khususnya pupuk, yang menjadi salah satu hambatan utama bagi petani dalam meningkatkan produktivitas secara optimal.

Harga pupuk nonsubsidi dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu isu penting yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan petani. Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menjelaskan bahwa kenaikan harga pupuk dunia dipicu oleh berbagai faktor eksternal, seperti konflik antarnegara yang mengganggu rantai pasok, fluktuasi harga gas alam sebagai bahan baku utama pupuk, hingga kebijakan negara produsen yang membatasi ekspor pupuk mereka (MediaIndonesia, 2025). Faktor-faktor tersebut mengakibatkan pasokan pupuk di

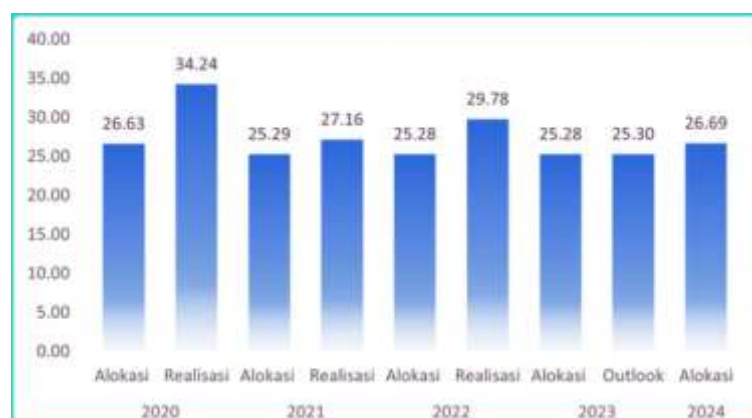
pasar internasional berkurang, sementara permintaan terus meningkat, sehingga harga pupuk mengalami lonjakan. Persoalan tersebut menunjukkan pentingnya peran negara dalam menjamin ketersediaan pupuk dengan harga yang dapat dijangkau oleh petani. Sebagai upaya untuk menjamin hal tersebut, salah satu bentuk intervensi dari pemerintah adalah menerapkan kebijakan subsidi pupuk.

Subsidi pupuk merupakan kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas petani secara merata, menjaga keberlanjutan usaha tani, mendukung stabilitas pasokan dan harga pangan, serta mendorong pencapaian swasembada pangan nasional (PT. Pupuk Indonesia, 2025). Pupuk memiliki peran strategis dalam pembangunan pertanian nasional karena berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan. Pemerintah memberikan subsidi pupuk sebagai bentuk intervensi kebijakan untuk menjamin ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau bagi petani, menjaga mutu pupuk sesuai standar yang ditetapkan, serta memastikan penyalurannya hingga ke tingkat petani. Melalui kebijakan ini, subsidi pupuk diharapkan mampu menekan biaya produksi usaha tani, meningkatkan minat petani untuk tetap berusaha tani secara berkelanjutan, serta mendorong peningkatan produktivitas pertanian guna mendukung stabilitas pasokan dan kedaulatan pangan nasional (Kementerian Pertanian RI, 2025).

Kebijakan subsidi pupuk ini, semula diperuntukkan bagi tujuh puluh komoditas, yang kemudian di perbarui melalui Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, komoditas

dikurangi menjadi sembilan komoditas prioritas, yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi, dan kakao. Kemudian, berdasarkan Peraturan terbaru Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, terdapat penambahan komoditas subsektor pangan, yaitu ubi kayu sehingga komoditas yang mendapat subsidi saat ini adalah sepuluh komoditas. Adapun pupuk untuk sektor pertanian yang semula lima jenis dikurangi menjadi tiga jenis, yakni pupuk NPK, Urea dan Organik.

Pengurangan komoditas dan jenis pupuk yang mendapat subsidi pupuk ini dilakukan sebagai bentuk efisiensi terhadap penggunaan anggaran subsidi. Akan tetapi, keterbatasan anggaran dari pemerintah mengakibatkan pengadaan pupuk bersubsidi tidak mampu memenuhi kebutuhan kelompok tani (Wahyu, 2022). Berikut adalah perkembangan alokasi dan realisasi subsidi pupuk tahun 2020 – 2024.



Gambar 1.1. Perkembangan Alokasi dan Realisasi Subsidi Pupuk

Sumber: Badan Keahlian DPR R.I, 2024.

Merujuk pada gambar 1.1., dalam lima tahun terakhir, angka realisasi setiap tahunnya selalu lebih tinggi dibandingkan alokasi yang ditetapkan dalam APBN.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pupuk petani sering kali melampaui perhitungan awal dalam perencanaan anggaran. Dalam hal ini, kebijakan subsidi pupuk masih menghadapi tantangan dalam menyesuaikan besaran anggaran dengan kebutuhan riil petani di lapangan.

Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rachmad Pribadi, mengatakan bahwa pasokan pupuk subsidi masih belum mampu memenuhi seluruh permintaan. Berdasarkan data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tahun 2025, sekitar 14,74 juta petani memerlukan pupuk subsidi untuk mengelola 25,25 juta hektare lahan. Kebutuhan pupuk dari total luas lahan tersebut diperkirakan mencapai 14,5 juta ton. Namun, pemerintah hanya menetapkan alokasi pupuk subsidi sebesar 9,55 juta ton untuk tahun 2024 dan 2025. Artinya, terdapat selisih sekitar 4,95 juta ton antara kebutuhan nyata petani dengan jumlah pupuk yang disediakan (CNBCIndonesia, 2025). Besaran volume pupuk subsidi yang dialokasikan pemerintah belum sepenuhnya mampu mencukupi kebutuhan petani, salah satunya karena keterbatasan kapasitas anggaran negara (Kementerian Pertanian Indonesia, 2025).

Adanya pengurangan komoditas tersebut karena keterbatasan kapasitas anggaran negara mengakibatkan kelompok petani yang membudidayakan komoditas di luar skema subsidi pupuk, seperti kentang, wortel, kubis dan buah-buahan lainnya menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pupuk. Biaya pembelian pupuk menjadi salah satu komponen pengeluaran terbesar dalam usaha tani hortikultura. Akibatnya, petani harus menanggung harga pupuk nonsubsidi

yang relatif tinggi dan ketidakpastian harga jual hasil panen yang berfluktuasi (Kompas, 2025).

Sektor pertanian merupakan penyumbang utama dalam perekonomian Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan data BPS Kabupaten Wonosobo Tahun 2024, sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 28,76% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Wonosobo. Selain itu, sebanyak 40,94% penduduk usia kerja di Wonosobo bekerja di sektor pertanian. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian menjadi tumpuan utama mata pencaharian masyarakat Wonosobo. Namun, Kabupaten Wonosobo, khususnya Bidang Hortikultura menghadapi berbagai tantangan, salah satunya keterbatasan akses terhadap pupuk bersubsidi. Komoditas unggulan daerah meliputi cabai, kentang, bawang daun, dan sayuran dataran tinggi yang tersebar di sejumlah kecamatan (meskipun persebaran komoditas tidak merata), termasuk Kalikajar, Garung, Mojotengah, dan Kejajar. Sejak tahun 2022, pemerintah membatasi komoditas hortikultura penerima pupuk subsidi hanya pada beberapa komoditas tertentu, sehingga meningkatkan beban biaya produksi bagi petani hortikultura yang membudidayakan komoditas di luar prioritas tersebut (TribunJateng, 2025).

Adapun penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Wonosobo sampai akhir 2024 belum berjalan secara optimal, di mana realisasi serapan pupuk Urea hanya sekitar 58,6 % dan NPK sekitar 69,08 % dari alokasi yang tersedia, sehingga lebih dari sepertiga petani belum mengambil pupuk yang sudah dialokasikan dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Rendahnya penyerapan ini disebabkan oleh beberapa kendala, termasuk alokasi pupuk subsidi yang hanya

mencakup sembilan komoditas sehingga petani yang mengelola komoditas di luar daftar merasa tidak mendapatkan manfaat langsung, serta kurangnya sosialisasi mengenai status pendaftaran dalam RDKK (Wonosobozone, 2024). Kondisi tersebut juga dialami oleh petani di Kecamatan Kejajar, yang mana mayoritas petani di wilayah tersebut menghadapi keterbatasan akses terhadap pupuk bersubsidi karena komoditas yang dibudidayakan di luar ketentuan penerima subsidi dalam kebijakan subsidi pupuk.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Wonosobo Tahun 2023, Kecamatan Kejajar memiliki sebanyak 8.263 Rumah Tangga Usaha Pertanian (RTUP), dari jumlah tersebut terdapat 6.109 RTUP yang membudidayakan kentang. Produksi kentang di wilayah ini, pada tahun 2024 mencapai 361,171 ton atau sekitar 83% dari total produksi kentang Kabupaten Wonosobo. Data tersebut menunjukkan bahwa Kejajar merupakan sentra utama produksi kentang dan memiliki kontribusi yang dominan dalam struktur pertanian hortikultura daerah. Kondisi geografis Kecamatan Kejajar yang berada di dataran tinggi dengan suhu yang relatif rendah sangat mendukung budidaya tanaman hortikultura. Kondisi tersebut serupa dengan wilayah Ponorogo bagian selatan, khususnya Kecamatan Pudak dan Kecamatan Ngebel yang berada di lereng Gunung Wilis, didominasi oleh aktivitas pertanian sayuran seperti wortel, kubis, dan buncis karena kondisi dataran tinggi yang subur dan beriklim sejuk. Namun, meskipun sayuran menjadi komoditas utama yang sesuai dengan karakteristik geografis wilayah tersebut, komoditas sayuran tidak termasuk dalam daftar sembilan komoditas yang mendapatkan subsidi pupuk (Wahyu Priandanata *et al.*, 2024).

Kecamatan Kejajar, meskipun menjadi sentra utama produksi kentang, dalam kurun waktu 2019 – 2023, hasil panen kentang di Kejajar mengalami penurunan. Tidak hanya terjadi pada kentang, tetapi juga dirasakan oleh petani hortikultura lainnya seperti kubis, sawi, dan daun bawang. Komoditas-komoditas tersebut adalah komoditas yang tidak mendapat alokasi pupuk bersubsidi. Berikut data produksi komoditas sayuran di Kecamatan Kejajar.



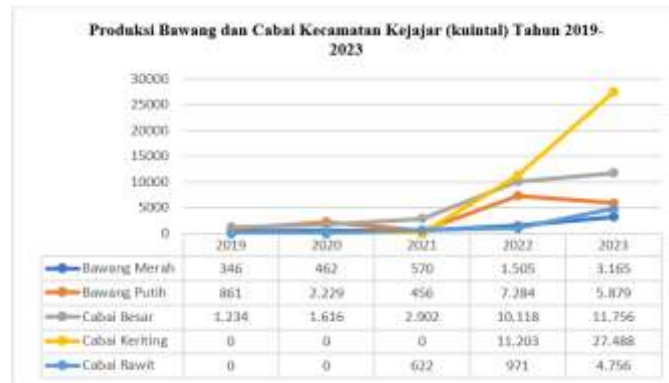
Gambar 1.2. Produksi Kentang, Kubis, Sawi, dan Daun Bawang Kecamatan Kejajar (kuintal) Tahun 2019-2023

Sumber: BPS, Kecamatan Kejajar dalam Angka 2024.

Grafik tersebut menunjukkan bahwa meskipun Kecamatan Kejajar dikenal sebagai sentra hortikultura, masih terdapat tantangan dalam menjaga kestabilan produksi. Penurunan yang terlihat pada grafik mencerminkan keterbatasan dukungan sarana produksi, khususnya karena komoditas-komoditas ini tidak termasuk dalam daftar penerima pupuk bersubsidi. Kondisi tersebut juga mengindikasikan adanya kerentanan yang dihadapi petani hortikultura nonsubsidi terhadap perubahan kebijakan maupun faktor eksternal lainnya yang memengaruhi usaha tani.

Sementara itu, komoditas yang memperoleh subsidi pupuk cenderung mengalami peningkatan hasil panen. Berdasarkan data BPS tahun 2024, bawang

merah, bawang putih, serta berbagai jenis cabai menunjukkan tren kenaikan signifikan dalam kurun 2020 – 2023.



Gambar 1.3. Produksi Bawang dan Cabai, Kecamatan Kejajar (kuintal) Tahun 2019 – 2023

Sumber: BPS, Kecamatan Kejajar dalam Angka 2024.

Grafik tersebut menunjukkan perkembangan produksi bawang dan cabai di Kecamatan Kejajar selama periode 2019–2023. Peningkatan produksi pada kedua komoditas ini menunjukkan adanya perubahan yang terjadi seiring dengan tersedianya pupuk bersubsidi. Dukungan tersebut membuat akses petani terhadap sarana produksi menjadi lebih stabil dan terjangkau, sehingga hasil tanaman komoditas yang menjadi prioritas mengalami peningkatan.

Berdasarkan wawancara awal, menurut seorang petani nonpenerima subsidi di Kecamatan Kejajar, harga pupuk nonsubsidi mencapai lima ribu hingga sepuluh ribu per kilogram tergantung pada jenis pupuk. Harga tersebut sangat memengaruhi kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk. Akibatnya, para petani terpaksa mengurangi dosis pupuk untuk menekan biaya produksi. Pengurangan penggunaan pupuk menyebabkan pemupukan tidak dilakukan secara optimal, sehingga produktivitas tanaman, khususnya komoditas kentang, mengalami

penurunan (Wawancara dengan Petani Nonpenerima Subsidi di Kecamatan Kejajar, 27 April 2025). Berikut adalah tabel perbandingan harga antara pupuk subsidi dan pupuk nonsubsidi.

Jenis Pupuk	Harga Eceran Tertinggi Pupuk Subsidi		Harga Pupuk Nonsubsidi 2025 (Rp/Kg)
	HET 2024 (Rp/Kg)	HET 2025 (Rp/Kg)	
Organik	800	640	2.500-10.000
Urea	2.250	1.800	4.960-9.500
ZA	-	1.360	5.960-6.000
NPK	2.300	1.840	5.218-20.160

Tabel 1.1. HET Pupuk Subsidi dan Harga Pupuk Nonsubsidi

Sumber: Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025; kompilasi penulis dari beberapa marketplace (untuk harga pupuk nonsubsidi).

Tabel tersebut menunjukkan adanya perbedaan harga yang cukup signifikan antara pupuk bersubsidi dan pupuk nonsubsidi, yang mana HET pupuk bersubsidi tahun 2025 relatif lebih rendah dibandingkan harga pupuk nonsubsidi pada jenis pupuk yang sama. Perbedaan harga paling terlihat pada pupuk NPK dan pupuk organik, karena harga pupuk nonsubsidi dapat jauh lebih tinggi dan berpotensi meningkatkan biaya produksi bagi petani yang tidak menerima subsidi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan pupuk bersubsidi sangat membantu dalam menekan biaya usaha tani, sementara petani nonpenerima subsidi cenderung menghadapi beban biaya *input* yang lebih tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, adanya kebijakan subsidi pupuk menimbulkan perbedaan dampak antara petani hortikultura penerima dan nonpenerima subsidi di Kecamatan Kejajar. Pengurangan komoditas dan jenis pupuk bersubsidi berdampak pada terbatasnya akses petani hortikultura terhadap pupuk dengan harga terjangkau,

sehingga memengaruhi pola penggunaan pupuk dan produktivitas usaha tani. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan subsidi pupuk belum sepenuhnya menjangkau karakteristik dan kebutuhan petani hortikultura dataran tinggi, sehingga penting dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan tersebut memberikan dampak sebagaimana yang diharapkan.

Dengan demikian, terlihat bahwa kebijakan subsidi pupuk di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo belum sepenuhnya memberikan dampak yang merata bagi petani hortikultura, baik petani penerima maupun nonpenerima subsidi. Perbedaan akses terhadap pupuk bersubsidi memengaruhi biaya produksi, pola penggunaan pupuk, dan produktivitas usaha tani, serta menunjukkan adanya ketidaksesuaian kebijakan dengan karakteristik komoditas hortikultura lokal. Berdasarkan kondisi tersebut, muncul pertanyaan penelitian mengenai mengapa kebijakan subsidi pupuk belum mampu mencapai dampak yang diharapkan bagi petani hortikultura di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk memahami dampak kebijakan dan faktor-faktor yang memengaruhinya.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Berkurangnya komoditas yang mendapat subsidi pupuk
2. Terbatasnya anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk subsidi pupuk
3. Tidak meratanya distribusi dan akses pupuk bersubsidi
4. Rendahnya partisipasi sebagian petani dalam kelompok tani
5. Tingginya harga pupuk nonsubsidi
6. Menurunnya produktivitas komoditas nonsubsidi

1.3. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti hendak mengkaji rumusan masalah, berikut:

1. Bagaimana dampak Kebijakan Subsidi Pupuk terhadap Petani Hortikultura di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan ketidakmampuan Kebijakan Subsidi Pupuk mencapai dampak yang diharapkan bagi Petani Hortikultura di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo?

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek yang ingin dicapai dalam kajian ini. Secara khusus, penelitian ini berfokus pada dua hal, berikut ini:

1. Menganalisis dampak dari kebijakan subsidi pupuk terhadap Petani Hortikultura di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.
2. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan ketidakmampuan kebijakan subsidi pupuk mencapai dampak yang diharapkan bagi Petani Hortikultura di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, menambah wawasan, dan memperkaya kajian akademik dalam bidang administrasi publik, khususnya terkait evaluasi dampak kebijakan subsidi pupuk. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi studi

berikutnya yang meneliti evaluasi dampak kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor pertanian, khususnya bagi Petani Hortikultura yang membudidayakan komoditas di luar skema subsidi pupuk.

1.5.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengalaman praktis dalam menganalisis kebijakan publik, terutama dalam menilai dampak kebijakan subsidi pupuk terhadap Petani Hortikultura.

2. Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat menjadi bahan kajian akademik serta menambah literatur di bidang kebijakan publik. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai rujukan bagi mahasiswa yang meneliti topik yang sama.

3. Bagi Pihak Terkait

Penelitian ini dapat berkontribusi sebagai pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan subsidi pupuk yang lebih inklusif, serta memberikan wawasan bagi Petani Hortikultura mengenai implikasi kebijakan tersebut terhadap usaha taninya.

1.6. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1. Penelitian Terdahulu

Berikut ini disajikan penelitian terdahulu sebagai rujukan peneliti dalam melakukan penelitian tentang Evaluasi Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk terhadap Petani Hortikultura: Studi Kasus di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Penelitian terkait evaluasi dampak kebijakan yang digunakan peneliti dalam menyusun penelitian, yaitu:

Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti/Tahun/Jurnal	Tujuan Penelitian	Landasan Teori	Metode	Hasil penelitian
1.	Marcelly et al., (2025). Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Kota Padang: Sebuah Evaluasi Menyeluruh terhadap Distribusi dan Dampaknya. <i>Journal of Syntax Literate</i> , 10(8).	Penelitian ini meneliti efektivitas kebijakan pupuk bersubsidi telah mencapai tujuannya dan mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam	Penelitian ini menggunakan enam tahapan evaluasi kebijakan menurut Edward A. Suchman.	Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan subsidi pupuk belum berjalan secara efektif. Dari enam indikator 6T, hanya ketepatan waktu dan tempat yang telah terpenuhi, sementara indikator lainnya belum optimal

		pelaksanaan kebijakan.			akibat lemahnya validasi data, keterbatasan sumber daya manusia, serta pelaksanaan teknis di lapangan yang belum maksimal.
2.	Widiyanto et al., (2024). Evaluasi Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Gresik. <i>Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara</i> , 2(3), 143-152.	Penelitian ini meneliti evaluasi pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Gresik.	Penelitian ini menggunakan teori evaluasi menurut William N Dunn.	Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi telah berjalan efektif dan sesuai ketentuan, meskipun masih ditemukan kendala teknis pada penggunaan aplikasi T-PUBRES. Keterbatasan alokasi disebabkan oleh penetapan jatah dari pemerintah

					pusat, bukan kekurangan distribusi di daerah.
3.	Ayu, I. W., <i>et al.</i> , (2022). Evaluasi Pelaksanaan Distribusi Subsidi Pupuk Di Kabupaten Sumbawa, Propinsi NTB. <i>Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis</i> , 6(4), 1597-1608.	Penelitian ini meneliti evaluasi distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat.	-	Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, belum sepenuhnya memenuhi prinsip enam tepat sehingga masih memerlukan perbaikan.
4.	Budiharjo (2022). Evaluasi Program Penyaluran Subsidi Pupuk di Kabupaten Sambas-Kalimantan Barat. <i>Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi dan Kebijakan Publik</i> , 8(2), 65-84.	Penelitian ini meneliti evaluasi distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Sambas-Kalimantan Barat.	Penelitian ini menggunakan teori William Dunn (2012).	Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program penyaluran subsidi pupuk tahun 2020 di Kabupaten Sambas memberikan

					dampak positif sekaligus negatif terhadap produktivitas petani, sehingga masih diperlukan perbaikan dalam pelaksanaannya ke depan.
5.	Defita, I. & Adnan, M. F. (2023). Evaluasi Pelaksanaan Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi bagi Petani di Kecamatan Sungai Tarab. <i>Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)</i> , 5(1), 74-80.	Penelitian ini meneliti evaluasi pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi bagi petani di Kecamatan Sungai Tarab.	Penelitian ini menggunakan teori William Dunn (2003) dan teori George E Edwards III.	Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Sungai Tarab belum optimal karena efektivitas dan efisiensi pelaksanaan belum tercapai. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya serta belum terpenuhinya seluruh tujuan

					ketepatan penyaluran.
6.	Febrianza & Mahriadi. (2025). Evaluasi Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di PT. Pusri Studi Kasus Kabupaten Banyuasin. <i>Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah</i> , 7(1), 32-42.	Penelitian ini meneliti penyaluran pupuk bersubsidi oleh pemerintah di kabupaten Banyuasin.	Penelitian ini menggunakan teori model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) oleh Stufflebeam	Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Banyuasin belum optimal akibat ketidaktepatan pendataan dan persyaratan Kartu Tani. Kondisi ini menyebabkan sebagian petani masih harus membeli pupuk dengan harga komersial meskipun kebijakan subsidi telah diterapkan.
7.	Sukmawati <i>et al.</i> (2023). <i>Changes in Subsidized Fertilizer Policy on Factors of Production and Farm Income of Red Chili (Capsicum Annuum L) in Cianjur Regency.</i> https://doi.org/10.38035/gijtm.v1i3.79	Penelitian ini meneliti dampak perubahan kebijakan Pupuk Bersubsidi terhadap faktor	-	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan	Penelitian ini menunjukkan bahwa Perubahan kebijakan Pupuk Bersubsidi berpengaruh

		produksi dan pendapatan petani cabai merah di Kabupaten Cianjur.		data melalui survei.	signifikan terhadap pendapatan petani cabai merah.
8.	Fatimah & Muhafidin. (2024). <i>Dynamics of Fertilizer Subsidy Implementation: A Case Study of Agricultural Policy in Indonesia. The International Journal of Science in Society.</i> https://doi.org/10.54783/ijsoc.v6i1.1068	Penelitian ini meneliti implementasi subsidi pupuk di Indonesia dan menganalisis dampaknya.	Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan dan teori Pembangunan Berkelanjutan.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi lapangan, dan studi literatur.	Penelitian ini menunjukkan bahwa ada tantangan signifikan dalam penerapan subsidi pupuk di Indonesia, termasuk inefisiensi birokrasi, salah alokasi sumber daya, dan konsekuensi yang tidak diinginkan yang berdampak buruk bagi petani kecil. Tantangan-tantangan ini menghambat efektivitas subsidi secara keseluruhan

					dalam mendukung produktivitas dan keberlanjutan pertanian.
9.	Putri <i>et al.</i> (2023). <i>Implementation Of Fertilizer Subsidies: Impact On Agriculture And Food Security In Indonesia (A Critical Review)</i> . <i>Marginal Journal Of Management Accounting General Finance And International Economic Issues</i> . https://doi.org/10.55047/marginal.v3i1.958	Penelitian ini meneliti implementasi subsidi pupuk dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan ketahanan pangan di Indonesia.	Penelitian ini menggunakan teori Ekonomi Keynesian, Kebijakan Subsidi Pertanian.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode studi literatur dengan teknik pengumpulan data melalui data sekunder.	Penelitian ini menunjukkan bahwa subsidi pupuk berkontribusi terhadap peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani, tetapi menghadapi tantangan seperti distribusi yang tidak optimal, ketidaktepatan alokasi, serta dampak lingkungan negatif.
10.	Yulianti & Astuti, (2025). Studi Evaluasi Dampak Kebijakan Zonasi Terhadap Peserta Didik Baru Tingkat SMA di Kecamatan	Penelitian ini meneliti dampak kebijakan zonasi	Penelitian ini menggunakan teori Evaluasi	Penelitian ini menggunakan pendekatan	Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan

	Purwokerto Timur Tahun Ajaran 2022/2023. <i>Journal of Politic and Government Studies</i> , 14(2), 1339-1351.	di Kecamatan Purwokerto Timur.	Dampak Kebijakan menurut Thomas, R. Dye.	kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.	zonasi meningkatkan akses pendidikan dan efisiensi biaya, namun juga menimbulkan ketimpangan kualitas, manipulasi domisili, dan ketidakpuasan masyarakat.
11.	Hidayat <i>et al.</i> (2024). Kajian Literatur: Dampak Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pertanian untuk Kesejahteraan Ekonomi Petani. <i>Jurnal Riset Kajian Teknologi dan Lingkungan</i> , 7(1), 241–245. https://doi.org/10.58406/jrktl.v7i1.1693	Penelitian ini meneliti dampak kebijakan pertanian terhadap pembangunan ekonomi, dengan fokus pada peningkatan produksi pertanian dan kesejahteraan petani.	Penelitian ini menggunakan teori Kebijakan Pertanian.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur teknik pengumpulan data melalui publikasi ilmiah.	Penelitian ini menunjukkan bahwa Subsidi Pupuk dan bibit tanaman meningkatkan pendapatan petani, sementara KUR membantu dalam permodalan meskipun dampaknya terhadap pendapatan

					bervariasi. Kebijakan-kebijakan ini memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan petani.
12.	Setyaningrum, W. F., & Yofa,. (2025). Dampak Pencabutan Subsidi Pupuk Terhadap Kinerja Usaha Tani Dan Efisiensi Komoditas Non-Subsidi: Studi Kasus Komoditas Kentang dan Wortel. <i>Analisis Kebijakan Pertanian</i> , 23(2). https://doi.org/10.21082/akp.v23.n2.2025.%25p	Penelitian ini meneliti respons petani kentang dan wortel yang tidak menerima alokasi pupuk bersubsidi.	-	Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan subsidi pupuk berdampak pada penurunan penggunaan pupuk, produktivitas, dan efisiensi usaha tani kentang dan wortel, sehingga secara keseluruhan memberikan dampak negatif terhadap pertanian hortikultura dan

					perlunya perbaikan tata kelola subsidi pupuk.
13.	Putri <i>et al.</i> (2024). <i>Unveiling the Welfare Puzzle: Exploring Fertilizer Subsidy Effects on Farmer's Earnings in Indonesia</i>. <i>Sriwijaya International Journal of Dynamic Economics and Business</i>, 129-146. https://doi.org/10.29259/sijdeb.v8i2.129-146	Penelitian ini meneliti efek subsidi pupuk terhadap produksi padi dan pendapatan petani di Indonesia.	Penelitian ini menggunakan teori Ekonomi Pertanian dengan model Cobb-Douglas.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui data panel dan menggunakan metode <i>Generalized Least Squares</i> (GLS).	Penelitian ini menunjukkan bahwa pupuk NPK dan SP36 secara signifikan meningkatkan hasil padi, sementara UREA dan ZA tidak memiliki dampak signifikan terhadap produksi. Selain itu, peningkatan upah menyebabkan penurunan produksi sebesar 1,343% tetapi secara bersamaan meningkatkan pendapatan petani sebesar 0,332%.

14.	Rusmayadi <i>et al.</i> (2024). <i>Strategic Agricultural Policies and Fertilizer Subsidies: Driving Business Success in Cianjur's Rice Sector</i>. <i>International Journal of Business, Law, and Education</i>, 5(2), 1667 - 1677. https://doi.org/10.56442/ijble.v5i2.676	Penelitian ini meneliti dampak kebijakan pertanian strategis dan subsidi pupuk terhadap keberhasilan bisnis petani padi di Cianjur, Indonesia.	Penelitian ini menggunakan teori Ekonomi Pertanian.	Penelitian ini menggunakan teori kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui data survei <i>cross-sectional</i> dari 300 petani padi di Indonesia.	Penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat pemanfaatan subsidi pupuk di kalangan petani padi di Cianjur berkorelasi positif dengan berbagai indikator keberhasilan usaha, menunjukkan bahwa subsidi tersebut memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan profitabilitas pertanian.
15.	Ashari <i>et al.</i> (2024). <i>The Impact of Subsidized Fertilizer Usage on Farmer Welfare in West Java</i>. <i>International Journal of Research and Innovation in Social Science</i>, VIII(V), 1785–	Penelitian ini meneliti dampak penggunaan subsidi pupuk terhadap	Penelitian ini menggunakan teori Kesejahteraan Ekonomi.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Pupuk Bersubsidi

	1805. https://doi.org/10.47772/ijriss.2024.805118	kesejahteraan petani di Jawa Barat.		dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, studi literatur dan survei.	secara signifikan meningkatkan kesejahteraan petani di Jawa Barat secara keseluruhan, meningkatkan daya saing mereka dalam budidaya padi, jagung, dan kedelai. Selain itu, Pupuk Bersubsidi memainkan peran penting dalam mendukung mata pencaharian petani dan produktivitas pertanian.
16.	Rifin <i>et al.</i> (2024). <i>Effect Of Fertiliser Subsidy On Fertiliser Usage In Rice Farming In Indonesia. BIO Web of Conferences</i> , 119, 01009. https://doi.org/10.1051/bioconf/202411901009	Penelitian ini meneliti dampak penggunaan pupuk terhadap produksi padi di Indonesia, secara khusus	Penelitian ini menggunakan teori Fungsi Produksi Cobb-Douglas.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder	Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan urea di kalangan petani nonsubsidi

		membandingkan efek pada petani bersubsidi dan nonsubsidi.		dari Survei Rumah Tangga tentang Tanaman Pangan 2014 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia dan Survei rumah tangga petani padi.	dan peningkatan aplikasi pupuk TSP dan NPK untuk petani bersubsidi dapat secara efektif meningkatkan produksi padi.
17.	Abdulumumini & Emmanuel. (2022). <i>Impact Of Fertilizer Subsidy On Farmers' Productivity: Case Study Of Rural Farmers In Lapai Communities Of Niger State, Nigeria. Economic And Business Review</i> , 3(3).	Penelitian ini meneliti dampak subsidi pupuk dalam meningkatkan produktivitas petani di komunitas pedesaan Lapai, Nigeria,	Penelitian ini menggunakan teori Kebijakan Ekonomi.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui data cross-sectional dari 142 petani menggunakan kuesioner terstruktur.	Penelitian ini menunjukkan bahwa Subsidi pupuk dan kredit mikro berkontribusi terhadap produktivitas petani. Subsidi pupuk lebih berdampak pada produktivitas padi dibandingkan jagung.

18.	Fan & Yang. (2023). <i>Assessing The Impact Of China's Agricultural Subsidy Reform On Fertilizer Management: A County-Level Empirical Analysis Based On Difference-In-Difference Model</i> . <i>Frontiers In Sustainable Food Systems</i> . https://doi.org/10.3389/fsufs.2023.1298425	Penelitian ini meneliti dampak reformasi subsidi pertanian China (ASR) pada pengelolaan pupuk di tingkat regional, dengan fokus pada 723 kabupaten di Area Produksi Gandum Utama China dari 2013 hingga 2020.	Penelitian ini menggunakan teori Ekonomi Pertanian dengan model Ekuilibrium Statis Parsial.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei.	Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi subsidi pertanian China (ASR) secara signifikan meningkatkan konsumsi pupuk sebesar 5-6% di Area Produksi Gandum Utama (MPA) dari 2013 hingga 2020.
19.	Njagi <i>et al.</i> (2024). <i>Assessment of the Impact of the Kenya Government Fertilizer Subsidy on the Performance of Domestic Private Sector Fertilizer Trade</i> . https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3914427/v1	Penelitian ini meneliti dampak subsidi pupuk pemerintah Kenya yang dipulihkan pada tahun 2022, yang bertujuan mengurangi beban kenaikan harga pupuk karena gangguan rantai pasokan global.	Penelitian ini menggunakan teori Efektivitas Kebijakan.	Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (kualitatif dan kuantitatif) dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, survei kualitatif, dan survei kuantitatif.	Penelitian ini menunjukkan bahwa subsidi pupuk dan benih memiliki dampak signifikan terhadap aktivitas pasar petani, meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Namun, ada tantangan dalam

					aksesibilitas dan distribusi yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitas program subsidi.
20.	Fujimoto & Suzuki. (2024). <i>Do Fertilizer and Seed Subsidies Strengthen Farmers' Market Participation? Evidence From Tanzania's Subsidy Program. Review Of Development Economics</i> . https://doi.org/10.1111/rode.13061	Penelitian ini meneliti dampak program subsidi Tanzania untuk pupuk anorganik dan peningkatan benih pada partisipasi petani di pasar <i>input</i> dan biji-bijian.	Penelitian ini menggunakan teori Ekonomi Pertanian.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi lapangan, dan studi literatur.	Penelitian ini menunjukkan bahwa petani yang menerima pupuk dan benih bersubsidi memiliki peningkatan hampir tiga kali lipat dalam menjual jagung atau padi dibandingkan dengan mereka yang hanya menerima Pupuk Bersubsidi.

Sumber: Hasil olahan penulis dari berbagai penelitian terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai kebijakan subsidi pupuk masih didominasi oleh penelitian yang berfokus pada aspek distribusi, implementasi kebijakan, serta pengaruh subsidi terhadap produktivitas dan pendapatan petani, khususnya pada komoditas tanaman pangan yang secara resmi termasuk dalam skema subsidi. Beberapa penelitian kuantitatif terbaru, seperti Setyaningrum dan Yofa (2025), memang telah mengkaji dampak pencabutan subsidi pupuk pada komoditas hortikultura nonsubsidi seperti kentang dan wortel, namun penelitian tersebut lebih menekankan pada perubahan biaya produksi, produktivitas, dan efisiensi teknis usaha tani, sehingga dampak kebijakan dipahami terutama dari sisi kinerja ekonomi usaha tani. Berbeda dengan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini tidak hanya melihat perubahan kinerja usaha tani, tetapi secara khusus mengevaluasi dampak kebijakan subsidi pupuk secara lebih komprehensif dengan menggunakan perspektif evaluasi dampak kebijakan menurut Thomas R. Dye, yang mencakup dampak yang diharapkan maupun tidak diharapkan, serta dampak langsung dan tidak langsung terhadap petani. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan teori Anderson untuk menganalisis faktor-faktor penyebab munculnya dampak kebijakan, baik yang bersumber dari desain kebijakan, pelaksanaan kebijakan, maupun kondisi sosial ekonomi petani. Perbedaan lainnya terletak pada objek dan subjek penelitian, di mana penelitian ini melibatkan petani hortikultura penerima dan nonpenerima subsidi pupuk di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, sebuah wilayah sentra hortikultura dataran tinggi dengan komoditas utama kentang, wortel, dan kubis yang tidak termasuk dalam daftar penerima subsidi pupuk.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah penelitian yang berfokus pada ketidaksesuaian antara kebijakan subsidi pupuk nasional dan kondisi empiris pertanian hortikultura lokal, serta memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai dampak kebijakan subsidi pupuk terhadap kelompok petani yang secara struktural berada di luar sasaran kebijakan.

1.6.2. Administrasi Publik

Administrasi publik didefinisikan oleh Chandler & Plano (dalam Keban, 2019), sebagai proses pengorganisasian dan koordinasi sumber daya dan staf publik untuk tujuan membuat, menerapkan, dan mengelola keputusan kebijakan publik. Administrasi publik sebagai suatu disiplin ilmu mengalami perkembangan yang dinamis seiring dengan perubahan konteks sosial, ekonomi, dan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara garis besar, administrasi publik terbagi menjadi dua konsentrasi utama, yaitu manajemen publik dan kebijakan publik.

Administrasi publik berperan penting dalam penyediaan layanan publik, termasuk implementasi kebijakan subsidi pupuk. Sebagai instrumen pemerintah, administrasi publik bertanggung jawab merancang, mengelola, dan mengevaluasi kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam distribusi subsidi pupuk, administrasi publik memastikan penyaluran yang tepat, efisien, dan transparan, sehingga petani memperoleh pupuk dengan harga terjangkau untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, administrasi publik memantau dan mengevaluasi kebijakan agar efektif dalam mengatasi masalah seperti kelangkaan dan penyalahgunaan. Dengan demikian, administrasi publik menjembatani kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat, terutama di sektor pertanian.

1.6.3. Paradigma Administrasi Publik

Menurut Thomas Kuhn dalam (dalam Keban, 2014), paradigma adalah seperangkat asumsi, teori, konsep, dan praktik yang membentuk perspektif ilmuwan dalam suatu periode tertentu. Hal ini juga terjadi pada administrasi publik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Nicholas Henry. Menurut Nicholas Henry dalam (dalam Keban, 2014), Robert T. Golembiewski menyatakan bahwa suatu disiplin ilmu memiliki standar yang terdiri dari lokus dan fokus.

Administrasi Publik mengalami tiga paradigma besar, yaitu: *Old Public Administration* (OPA), *New Public Management* (NPM), dan *New Public Services* (NPS).

1.6.3.1. *Old Public Administration (OPA)*

Paradigma *Old Public Administration* (OPA), juga disebut Administrasi Publik Tradisional atau Klasik. Paradigma ini berawal dari gagasan Woodrow Wilson tentang dikotomi antara administrasi dan politik (Supriyadi, 2021). Paradigma ini lebih menekankan pada pengelolaan efisiensi dan birokrasi yang efektif dalam pelayanan publik dan lebih fokus pada lokasi administrasi negara yang tepat (Djafar, 2024).

Menurut Thoha (dalam Djafar, 2024) paradigma OPA memiliki ciri utama, yaitu:

- a. Efisiensi dan biaya, paradigma ini menekankan pengelolaan birokrasi yang efisien dengan penggunaan sumber daya minimal.
- b. Model hierarki, paradigma ini mengadopsi struktur birokrasi Max Weber dengan kontrol ketat dan pemerintahan terpusat.

- c. Spesialisasi kerja, paradigma ini menekankan pada tugas yang dibagi sesuai dengan spesialisasi untuk meningkatkan efisiensi.
- d. Pemisahan antara politik dan administrasi, dalam paradigma ini administrasi dianggap netral dan hanya menjalankan kebijakan politik.
- e. Orientasi pelayanan publik, dalam paradigma ini layanan dipandang sebagai hasil dari proses administratif yang efisien.
- f. Tata kelola formal, paradigma ini berfokus pada aturan, prosedur, dan standar operasional untuk memastikan konsistensi.

1.6.3.2. *New Public Management (NPM)*

New Public Management (NPM) merupakan konsep baru dalam administrasi publik yang awalnya diterapkan di sektor bisnis dan privat. Inti dari NPM adalah mentransformasikan kinerja organisasi bisnis ke sektor publik untuk meningkatkan efektivitas administrasi. Konsep ini juga meninjau kembali peran administrator publik dan aktor birokrasi (Djafar, 2024).

Paradigma NPM muncul karena OPA dianggap kurang efektif dalam pelayanan publik. Menurut Hood (dalam Keban, 2014), NPM memiliki tujuh prinsip utama, yaitu:

- a. Manajemen profesional di sektor publik
- b. Penggunaan indikator kinerja
- c. Kontrol berbasis *output*
- d. Fokus pada unit kerja kecil
- e. Peningkatan kompetisi
- f. Disiplin ketat dalam penggunaan sumber daya

Vigoda (dalam Keban, 2014), menekankan bahwa NPM mengadaptasi prinsip bisnis dan manajemen untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja birokrasi modern.

1.6.3.3. *New Public Services (NPS)*

Paradigma New Public Service (NPS) berbeda dengan paradigma sebelumnya, berakar pada teori demokrasi yang menekankan prinsip kesetaraan, partisipasi masyarakat, dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat. Dalam paradigma NPS, administrasi publik harus melibatkan masyarakat dalam setiap proses kebijakan dan pelayanan publik (Djafar, 2024).

Menurut Denhart & Denhart (dalam Keban, 2014), administrasi publik harus:

- a. Melayani warga, bukan pelanggan
- b. Mengutamakan kepentingan publik
- c. Menghargai kewarganegaraan lebih dari kewirausahaan
- d. Berpikir strategis dan bertindak demokratis
- e. Menyadari kompleksitas akuntabilitas
- f. Melayani, bukan mengendalikan
- g. Menghargai orang, bukan hanya produktivitas

Pada perkembangannya, ilmu administrasi publik berfokus pada upaya membangun sistem pemerintahan yang baik. Terdapat Tiga dimensi utama *governance*, meliputi: banyaknya pelaku dalam sistem administrasi, dasar kekuasaan yang efisien dan efektif, serta respons lembaga terhadap masalah publik.

Adapun karakteristik *good governance* dari UNDP menurut Rondinelli (dalam Keban, 2014), meliputi:

- a. Partisipasi
- b. Penegakan hukum
- c. Transparansi
- d. *Responsivitas*
- e. Konsensus
- f. Kesetaraan
- g. Efektivitas dan Efisiensi
- h. Akuntabilitas
- i. Visi strategis

New Public Services (NPS) dalam penelitian ini, digunakan sebagai pendekatan dalam mengkaji evaluasi dampak kebijakan subsidi pupuk terhadap Petani Hortikultura. Penelitian ini mencerminkan paradigma *New Public Service* (NPS) karena menempatkan petani hortikultura sebagai fokus utama dalam evaluasi kebijakan publik. Sesuai dengan prinsip NPS yang menekankan partisipasi masyarakat, kesetaraan, dan penghargaan terhadap aspirasi warga, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan subsidi pupuk berdampak langsung terhadap kehidupan petani sebagai penerima manfaat. Dengan memilih lokasi khusus di Kecamatan Kejajar, penelitian ini juga menunjukkan perhatian terhadap konteks lokal dan keberagaman sosial, sejalan dengan nilai-nilai NPS yang menekankan pelayanan publik yang adil, inklusif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

1.6.4. Kebijakan Publik

Thomas R. Dye (dalam Keban, 2019), mendefinisikan kebijakan publik sebagai segala yang dilakukan pemerintah, alasan di baliknya, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Subsidi pupuk merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam kerangka kebijakan publik yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional. Pemberian subsidi pupuk dimaksudkan untuk memastikan akses petani terhadap pupuk terjangkau, meningkatkan produktivitas, serta menekan biaya produksi. Dalam konteks ini, adanya kebijakan subsidi pupuk mencerminkan upaya pemerintah untuk merespons kebutuhan sektor pertanian yang strategis. Namun, kebijakan subsidi pupuk di Indonesia dalam implementasinya masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti keterbatasan alokasi anggaran dan distribusi yang tidak merata. Selain itu, kebijakan yang hanya memprioritaskan beberapa komoditas utama menyebabkan petani yang menanam komoditas nonprioritas tidak mendapatkan akses terhadap Pupuk Bersubsidi, sehingga menimbulkan ketimpangan dan berdampak pada penurunan produktivitas. Oleh karena itu, kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah Indonesia diharapkan mampu mencapai hasil yang sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan publik tersebut.

1.6.5. Evaluasi Kebijakan

Kebijakan publik mencakup tiga hal penting, yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan (Nugroho, 2023: 220). Tahap terakhir dalam kebijakan adalah evaluasi, di mana pihak yang berwenang menilai

apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan (Keban, 2019: 80).

1.6.5.1. Definisi Evaluasi Kebijakan

Riant Nugroho (2009) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai analisis hasil berdasarkan standar yang ditentukan (Affrian, 2023: 73). Sementara itu, Anderson (2008), menjelaskan evaluasi kebijakan merupakan proses menilai substansi, implementasi, dan dampaknya sebagai bagian dari fungsi kebijakan (Affrian, 2023: 73). Evaluasi kebijakan merupakan aktivitas fungsional yang berlangsung sepanjang proses kebijakan, bukan hanya di tahap akhir. Evaluasi mencakup perumusan masalah, usulan program, implementasi, serta penilaian dampak kebijakan.

Dari beberapa definisi sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan adalah proses menilai isi, pelaksanaan, dan dampaknya guna mengukur efektivitasnya. Tidak terbatas pada tahap akhir, evaluasi mencakup seluruh tahapan kebijakan, dari perumusan masalah hingga penilaian hasil. Proses ini melibatkan analisis hasil berdasarkan standar yang ditetapkan serta penilaian terhadap konsekuensi dan pencapaian tujuan kebijakan.

1.6.5.2. Tujuan Evaluasi Kebijakan

Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan publik dalam memenuhi tanggung jawab kepada konstituen serta mengukur pencapaian tujuan (Nugroho, 2023: 184). Proses ini juga bertujuan mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan realitas. Adapun menurut Edward III, evaluasi kebijakan

bertujuan membandingkan hasil program dengan target yang ditetapkan (Affrian, 2023: 73). Selanjutnya, Lester & Stewart (2000), evaluasi mencakup dua tugas utama: pertama, menggambarkan konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijakan; kedua, menilai keberhasilannya berdasarkan standar yang telah ditetapkan (Winarno, 2023: 193).

1.6.5.3. Indikator Evaluasi Kebijakan

Menurut Nugroho, evaluasi memberikan informasi valid dan terpercaya mengenai kinerja kebijakan, termasuk pencapaian kebutuhan, nilai, dan peluang melalui tindakan publik (Maharani, D, 2022: 167-168).

William N. Dunn (dalam Maharani, 2022) mengidentifikasi enam indikator evaluasi kebijakan, yaitu:

- a. Efektivitas, mengukur sejauh mana suatu kebijakan mencapai tujuan atau hasil yang diharapkan
- b. Efisiensi, menilai besarnya usaha yang diperlukan untuk mencapai tingkat efektivitas tertentu.
- c. Kecukupan, melihat apakah efektivitas kebijakan mampu memenuhi kebutuhan, nilai, atau peluang tanpa menimbulkan masalah baru.
- d. Pemerataan, memastikan dampak dan manfaat kebijakan didistribusikan secara adil.
- e. *Responsivitas*, mengukur kemampuan kebijakan dalam memenuhi kebutuhan, preferensi, dan nilai kelompok masyarakat tertentu.
- f. Ketepatan, menilai kesesuaian tujuan program dengan nilai-nilai yang mendasarinya serta validitas asumsi yang digunakan.

1.6.5.4. Ruang Lingkup Evaluasi Kebijakan

Menurut Keley (dalam Sugiyono, 2018), lingkup penelitian dalam evaluasi kebijakan berada pada seluruh komponen dalam proses kebijakan yang mencakup berbagai aspek, sebagai berikut:

1. **Profil Pembuat Kebijakan**

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik pembuat kebijakan, serta menganalisis peran kelompok kepentingan dan kelompok penekan dalam proses perumusan kebijakan.

2. **Rumusan Kebijakan**

Penelitian ini membahas proses perumusan kebijakan, termasuk durasi pembuatannya, aktor yang terlibat, ide-ide yang muncul dalam diskusi, serta tujuan dan substansi kebijakan. Selain itu, penelitian ini juga meninjau uji publik, sosialisasi, dan kejelasan formulasi kebijakan. Tujuannya adalah untuk memahami latar belakang perumusan kebijakan serta sejauh mana kebijakan tersebut dipahami dan memberikan manfaat bagi pihak yang terdampak.

3. **Implementasi Kebijakan**

Studi mengenai implementasi kebijakan identik dengan penelitian terhadap proses pelaksanaan suatu kebijakan. Fokus utama dari penelitian dalam aspek ini adalah untuk menganalisis sejauh mana program-program yang telah dirancang dalam kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif.

4. *Output* Kebijakan

Penelitian yang berfokus pada *output* merupakan studi yang menilai produk yang dihasilkan dari suatu kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai target atau *output* yang telah ditetapkan.

5. *Outcome* Kebijakan

Penelitian yang berfokus pada *outcome* atau dampak kebijakan berkaitan dengan konsekuensi, baik yang bersifat positif maupun negatif, dari pencapaian *output* yang dihasilkan. Jika *output* yang diharapkan tidak tercapai, penelitian ini juga menganalisis dampak yang mungkin timbul, baik yang menguntungkan maupun merugikan.

Penelitian ini mengkaji kebijakan pada aspek *outcome* dengan meneliti dampak kebijakan subsidi pupuk terhadap Petani Hortikultura di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis konsekuensi dari kebijakan tersebut terhadap usaha tani hortikultura.

1.6.6. Evaluasi Dampak

1.6.6.1. Definisi Evaluasi Dampak

Evaluasi dampak didefinisikan oleh Bamberger & Hewitt (1986), sebagai proses sistematis untuk menilai perubahan yang dihasilkan oleh suatu program, baik perubahan langsung maupun tidak langsung, serta untuk mengidentifikasi sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan dengan intervensi program.

Menurut Rossi, Lipsey, dan Freeman (2004) dalam bukunya "*Evaluation: A Systematic Approach*", evaluasi dampak (*impact evaluation*) adalah proses

analisis yang bertujuan untuk menentukan efek kausal dari suatu program atau kebijakan terhadap kelompok sasaran. Evaluasi ini menekankan pada hasil akhir yang muncul sebagai dampak langsung dari kebijakan yang dijalankan.

Dari definisi di atas, peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi dampak adalah proses sistematis untuk menilai perubahan akibat suatu program atau kebijakan, baik langsung maupun tidak langsung. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat seberapa besar perubahan yang terjadi akibat adanya kebijakan tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap kelompok sasaran, dengan fokus pada hasil akhir yang dicapai.

1.6.6.2. Pendekatan dalam Dampak Kebijakan

Menurut Langbein (dalam Wibawa, Samodra., *et al.*, 1994) terdapat beberapa dimensi penting dalam menilai dampak kebijakan:

1. Aspek Waktu, dampak kebijakan harus dianalisis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
2. Perbedaan Dampak Aktual dan Harapan, evaluasi perlu mempertimbangkan potensi dampak yang tidak diinginkan atau berlawanan dengan tujuan awal kebijakan.
3. Tingkat Agregasi Dampak, perubahan yang dirasakan individu dapat memengaruhi dinamika sosial secara keseluruhan.
4. Jenis Dampak, dampak kebijakan dapat mencakup aspek ekonomi, proses pengambilan keputusan, perubahan sikap masyarakat, serta kualitas hidup individu, kelompok, dan komunitas dalam aspek nonekonomi.

Adapun menurut Wibawa, Samodra., *et al.*, (1994: 53-59), evaluasi kebijakan juga mempertimbangkan unit sosial yang terdampak, meliputi:

1. Dampak pada Individu, kebijakan dapat memengaruhi individu dalam berbagai aspek, termasuk:
 - a. Aspek psikologis
 - b. Aspek lingkungan
 - c. Aspek ekonomi
 - d. Aspek sosial dan personal
2. Dampak pada Organisasi, kebijakan dapat berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap organisasi atau kelompok. Dampak langsung dapat mendukung atau menghambat pencapaian tujuan organisasi, sementara dampak tidak langsung mungkin berpengaruh terhadap dinamika internalnya.
3. Dampak pada Masyarakat, kebijakan berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam memberikan layanan bagi anggotanya, mencerminkan seberapa efektif kebijakan tersebut dalam mendukung kesejahteraan komunitas.
4. Dampak pada lembaga dan sistem sosial, seperti:
 - a. Beban kerja yang berlebihan
 - b. Distribusi sumber daya yang tidak merata
 - c. Keterbatasan sumber daya yang tersedia
 - d. Kurangnya kemampuan adaptasi
 - e. Koordinasi yang lemah

- f. Menurunnya legitimasi dan kepercayaan masyarakat
- g. Tidak adanya mekanisme koreksi dan adaptasi, digantikan dengan sistem kuota.

Sementara itu, menurut Dye (2017) dampak kebijakan tidak dapat disamakan dengan *output* kebijakan. Pengeluaran pemerintah, seperti biaya pendidikan per murid atau dana kesejahteraan per kapita, hanya mencerminkan aktivitas administratif, bukan perubahan nyata yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran dampak kebijakan harus berfokus pada sejauh mana aktivitas pemerintah mampu menimbulkan perubahan sosial yang relevan dengan tujuan kebijakan tersebut (Dye, 2017: 52). Dampak kebijakan adalah pengaruh nyata yang ditimbulkan terhadap kondisi masyarakat yang meliputi dimensi berikut:

Pertama, dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Kelompok sasaran dipahami sebagai bagian dari populasi yang secara khusus menjadi target dari pelaksanaan suatu program kebijakan. Dalam proses evaluasi, kelompok sasaran perlu diidentifikasi terlebih dahulu untuk menentukan bentuk perubahan yang diharapkan, baik dalam aspek fisik, ekonomi, maupun dalam peningkatan pengetahuan, sikap, kesadaran, minat, atau perilaku masyarakat (Dye, 2017: 53).

Kedua, dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan. Semua program dan kebijakan memiliki dampak yang berbeda-beda terhadap berbagai segmen masyarakat. Identifikasi terhadap

kelompok nontarget penting untuk suatu kebijakan. Dampak terhadap kelompok nontarget ini dapat berupa manfaat sekaligus biaya (Dye, 2017: 53).

Ketiga, dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa mendatang. Manfaat atau biaya suatu program atau kebijakan sangat bergantung pada tujuan serta jangka waktu pelaksanaannya, apakah bersifat sementara atau berkelanjutan. Program yang bersifat baru umumnya menghasilkan dampak positif pada tahap awal implementasi, namun efek tersebut cenderung menurun seiring berjalannya waktu. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat jangka panjang, seperti program Jaminan Sosial, sering kali menunjukkan hasil yang bertahap namun memiliki daya tahan yang lebih stabil dalam jangka panjang (Dye, 2017: 53).

Keempat, dampak biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program kebijakan. Dimensi ini berkaitan dengan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan suatu program kebijakan. Dalam konteks evaluasi kebijakan publik, perhitungan biaya langsung menuntut adanya perbandingan antara manfaat yang diperoleh dengan total biaya yang dikeluarkan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Namun demikian, meskipun seluruh komponen manfaat dan biaya dapat diidentifikasi, penentuan keseimbangan bersih antara keduanya tetap menjadi persoalan yang kompleks karena perbedaan persepsi dalam mendefinisikan apa yang dimaksud sebagai manfaat dan biaya (Dye, 2017:53).

Kelima, dampak biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat akibat suatu kebijakan. Dampak ini mencakup beban sosial yang timbul akibat kebijakan tertentu, termasuk efek simbolis yang memengaruhi persepsi masyarakat

terhadap pemerintah. Dampak simbolis ini mencerminkan bagaimana kebijakan dinilai bukan hanya dari hasil nyata, tetapi juga dari niat, citra, dan pesan moral yang disampaikan pemerintah kepada publik. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen tindakan, tetapi juga sebagai simbol yang membentuk kepercayaan, legitimasi, dan kohesi sosial dalam masyarakat (Dye, 2017: 54).

Penelitian ini menggunakan teori dampak oleh Dye (2017) yang mencakup lima dimensi, yaitu: dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat; dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan; dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa mendatang; dampak biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program kebijakan; dan dampak biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat akibat suatu kebijakan.

1.6.6.3. Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan Dampak Kebijakan Publik

Anderson mengemukakan bahwa kegagalan kebijakan dalam mencapai dampak yang diharapkan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan oleh Winarno (2023), dengan merumuskan sembilan faktor yang berkontribusi terhadap kegagalan dampak kebijakan, yaitu:

- a. Keterbatasan sumber daya yang tersedia
- b. Cara implementasi kebijakan yang tidak tepat
- c. Orientasi kebijakan yang terlalu sempit karena hanya berfokus pada satu permasalahan

- d. Cara masyarakat menyesuaikan kebijakan publik yang justru menghambat efektivitas kebijakan tersebut
- e. Tujuan kebijakan yang saling bertentangan
- f. Biaya implementasi yang terlalu tinggi
- g. Karakteristik masalah yang sulit untuk diselesaikan
- h. Kompleksitas masalah yang tinggi, dan
- i. Munculnya permasalahan baru yang mengalihkan perhatian para pelaksana kebijakan.

Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi dampak kebijakan dengan merujuk pada teori Anderson yang dikembangkan oleh Winarno (2023). Dari sembilan faktor kegagalan kebijakan yang diidentifikasi, analisis difokuskan pada keterbatasan sumber daya, orientasi kebijakan yang sempit, karakteristik masalah yang sulit diselesaikan, serta kompleksitas permasalahan dalam kebijakan subsidi pupuk di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

1.6.7. Kebijakan Subsidi Pupuk

1.6.7.1. Definisi Pupuk Bersubsidi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, Pupuk Bersubsidi didefinisikan Pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Petani dan Pembudi daya Ikan yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian dan perikanan. Jenis pupuk yang disubsidi meliputi urea, SP-36, ZA, NPK, dan pupuk organik, yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan sektor pertanian.

1.6.7.2. Tujuan Kebijakan Subsidi Pupuk

Tujuan Pupuk Bersubsidi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, (2005), pupuk merupakan komoditi penting dalam usaha mencapai ketahanan nasional dan pemerintah telah memberikan subsidi dalam rangka pengadaan dan penyaluran beberapa jenis pupuk tertentu.

Adapun peran pupuk bersubsidi, yaitu:

- a. Petani memperoleh pupuk dengan harga terjangkau
- b. Subsidi menjamin ketersediaan pupuk sampai pelosok
- c. Kualitas pupuk yang dipasok terjamin karena memenuhi standar dan spesifikasi yang disyaratkan
- d. Subsidi pupuk meningkatkan minat para petani untuk tetap bertani secara berkesinambungan
- e. Subsidi berperan menjaga dan meningkatkan produktivitas pertanian nasional guna mendukung kedaulatan negara (Kementerian Pertanian Indonesia, 2025).

1.6.7.3. Mekanisme Distribusi Pupuk Bersubsidi

Mekanisme distribusi subsidi pupuk diatur secara ketat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Alokasi subsidi pupuk ditetapkan berdasarkan luas lahan, jenis tanaman, dan kebutuhan pertanian di setiap daerah. Distribusi dilakukan melalui rantai pasok yang melibatkan produsen pupuk, titik serah (Pengecer/Gapoktan/Pokdakan), dan petani. Pemerintah juga mengawasi distribusi melalui sistem informasi terpadu untuk memastikan subsidi pupuk sampai ke

tangan petani yang benar-benar membutuhkan, yaitu petani yang terdaftar dalam sistem data pertanian seperti SIMLUHTAN.

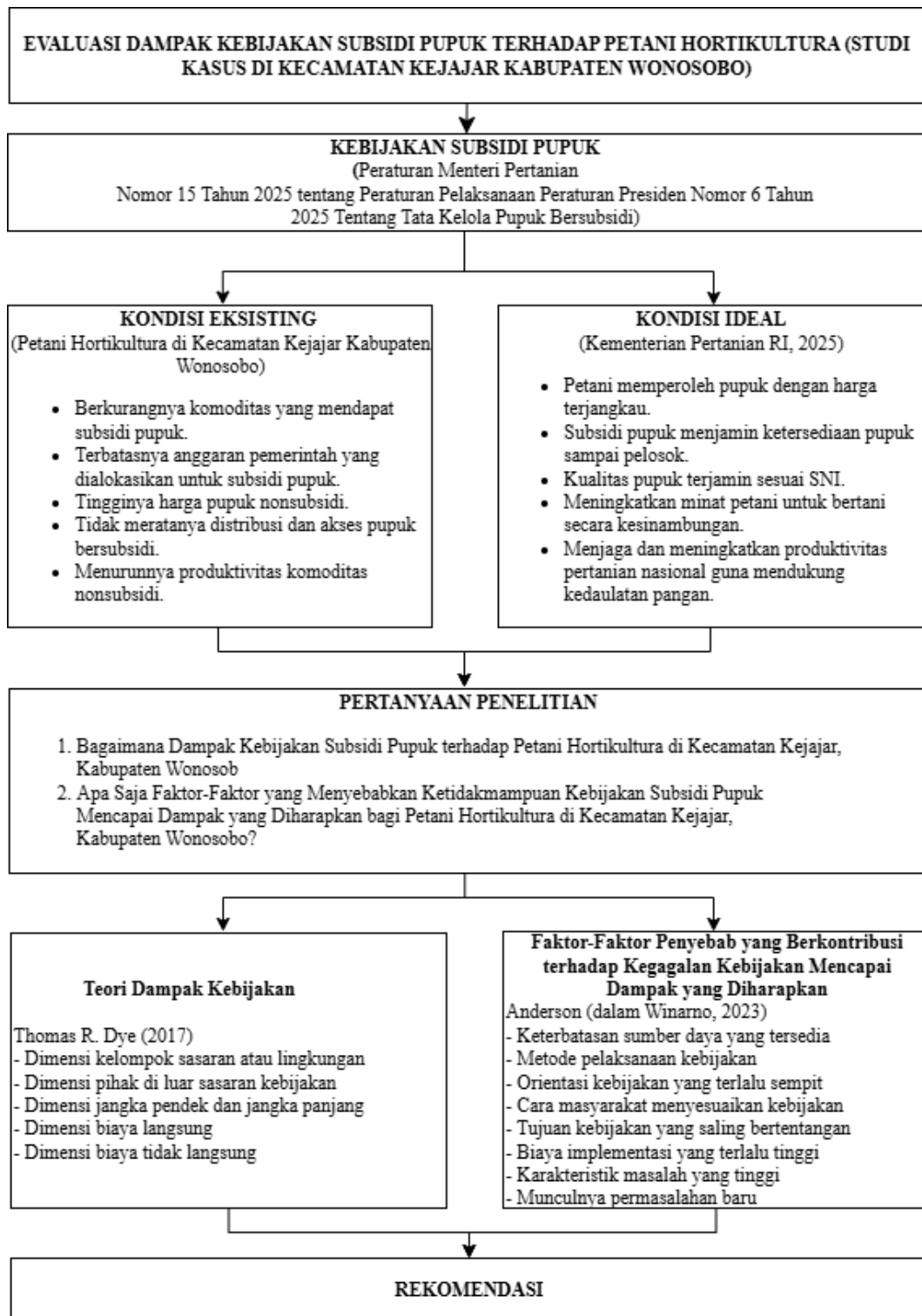
1.6.7.4. Sasaran Kebijakan Pupuk Bersubsidi

Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani pada subsektor tanaman pangan, hortikultura, dan/atau perkebunan, dengan batasan luas lahan paling banyak dua hektare setiap musim tanam. Pupuk Bersubsidi subsektor tanaman pangan mencakup usaha tani padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu. Sementara itu, pada subsektor hortikultura, Pupuk Bersubsidi diberikan untuk petani yang menanam cabai, bawang merah, dan bawang putih. Pada subsektor perkebunan, Pupuk Bersubsidi dialokasikan bagi petani yang membudidayakan tebu rakyat, kakao, dan kopi.

1.6.8. Petani Hortikultura

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura, (2010), Petani Hortikultura, atau selanjutnya disebut petani, merupakan warga negara Indonesia yang secara individu atau bersama keluarganya mengelola unit usaha budidaya hortikultura. Sementara itu, unit usaha budidaya hortikultura adalah satuan area lahan yang dimanfaatkan untuk menanam tanaman hortikultura, baik di lahan tanah maupun media tanam lainnya, dengan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam ekosistem yang mendukung. Adapun tanaman hortikultura mencakup berbagai jenis tumbuhan yang menghasilkan buah, sayuran, bahan obat nabati, serta florikultura. Termasuk di dalamnya adalah jamur, lumut, dan tanaman air yang berperan sebagai sumber pangan, obat-obatan herbal, maupun elemen estetika.

1.6.9. Kerangka Pikir



Gambar 1.4. Kerangka Pikir

Sumber: Telah diolah kembali, 2025.

1.7. Operasionalisasi Konsep

Tabel 1.3. Operasionalisasi Konsep

Rumusan Masalah	Fenomena	Sub Fenomena	Pertanyaan Penelitian
1. Bagaimana Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk terhadap Petani Hortikultura di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo?	1. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat.	Sejauh mana kebijakan subsidi pupuk mampu menghasilkan perubahan bagi kelompok penerima manfaat, baik dalam aspek fisik, ekonomi, maupun peningkatan kapasitas masyarakat.	1. Bagaimana kebijakan subsidi pupuk memengaruhi ketersediaan dan kemudahan akses pupuk bagi petani hortikultura? 2. Sejauh mana subsidi pupuk meringankan beban biaya pembelian pupuk bagi petani hortikultura? 3. Bagaimana subsidi pupuk memengaruhi perilaku petani hortikultura penerima subsidi dalam praktik budi daya mereka?
	2. Dampak pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok di luar sasaran atau tujuan kebijakan	Pengaruh kebijakan subsidi pupuk terhadap pihak di luar target utama, yang dapat menimbulkan manfaat tambahan ataupun kerugian bagi kelompok nonpenerima manfaat.	1. Bagaimana kondisi bertani yang dilakukan oleh petani hortikultura nonpenerima subsidi dalam menghadapi harga pupuk yang tinggi? 2. Bagaimana perubahan perilaku penggunaan

			pupuk pada petani nonpenerima subsidi? 3. Bagaimana keterbatasan akses terhadap pupuk subsidi berdampak pada hasil produksi dan keuntungan petani hortikultura nonpenerima?
	3. Dampak pada keadaan-keadaan sekarang dan keadaan di masa mendatang.	Sejauh mana kebijakan subsidi pupuk memberikan manfaat langsung dalam jangka pendek sekaligus mempertahankan keberlanjutan hasil dan dampaknya di masa mendatang.	1. Bagaimana dampak subsidi pupuk terhadap hasil panen petani penerima pupuk bersubsidi? 2. Sejauh mana petani hortikultura mengalami ketergantungan terhadap ketersediaan pupuk subsidi dalam perencanaan usaha tani mereka?
	4. Dampak biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program kebijakan.	Sejauh mana keseimbangan antara biaya yang dikeluarkan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk dengan manfaat yang diperoleh masyarakat.	1. Sejauh mana distribusi pupuk subsidi telah sesuai dengan kebutuhan petani hortikultura?
	5. Dampak biaya tidak langsung yang ditanggung oleh	Dampak simbolis dari kebijakan subsidi pupuk yang	1. Bagaimana kebijakan subsidi yang tidak merata memengaruhi semangat,

	masyarakat akibat suatu kebijakan	memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah.	motivasi, dan keberlanjutan usaha petani hortikultura?
2. Apa Saja Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ketidakmampuan Kebijakan Subsidi Pupuk Mencapai Dampak yang Diharapkan bagi Petani Hortikultura di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo?	1. Keterbatasan sumber daya yang tersedia	Keterbatasan distribusi pupuk bersubsidi, baik dari sisi alokasi maupun tenaga pelaksana di lapangan.	1. Apakah alokasi pupuk subsidi yang tersedia telah memenuhi kebutuhan riil petani hortikultura di Kecamatan Kejajar? 2. Apakah jumlah agen atau penyuluh pertanian penyalur subsidi sudah cukup untuk menjangkau seluruh wilayah pertanian?
	2. Orientasi kebijakan yang terlalu sempit karena hanya berfokus pada satu permasalahan	Kebijakan subsidi pupuk yang hanya difokuskan pada sepuluh komoditas strategis.	1. Apakah kebijakan subsidi pupuk saat ini sudah mempertimbangkan keragaman komoditas hortikultura lokal?
	3. Karakteristik masalah yang sulit untuk diselesaikan	Kebijakan subsidi pupuk sulit menyesuaikan kebutuhan lokal.	1. Apakah kebijakan subsidi pupuk cocok dengan kondisi pertanian di Kejajar?
	4. Kompleksitas masalah yang tinggi	Hambatan administrasi dan distribusi pupuk subsidi di tingkat petani.	1. Apa saja bentuk hambatan administrasi dan distribusi pupuk subsidi yang

			dialami petani hortikultura di Kecamatan Kejajar?
--	--	--	--

Sumber: Telah diolah kembali, 2025.

1.8. Argumen Penelitian

Kebijakan subsidi pupuk menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian di Indonesia. Melalui kebijakan ini, diharapkan petani memperoleh pupuk dengan harga yang lebih terjangkau sehingga beban biaya produksi berkurang, produktivitas tanaman meningkat, dan ketahanan pangan nasional lebih terjamin. Akan tetapi, dalam beberapa tahun terakhir kebijakan tersebut mengalami sejumlah perubahan. Salah satunya berkaitan dengan pembatasan komoditas yang berhak memperoleh subsidi yang mana fokus pemerintah lebih mengarah pada komoditas prioritas nasional. Kondisi tersebut membuat tanaman hortikultura, seperti kentang, kubis, dan sawi, tidak lagi mendapatkan subsidi, meskipun komoditas tersebut memiliki peran penting, terutama bagi petani di wilayah dataran tinggi seperti Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.

Kondisi ini menimbulkan ketimpangan akses terhadap pupuk, terutama bagi petani hortikultura dengan komoditas nonprioritas. Para petani tersebut tidak lagi bisa mengandalkan pupuk bersubsidi, pada akhirnya harus membeli pupuk nonsubsidi yang harganya jauh lebih tinggi. Akibatnya, biaya produksi meningkat, sementara harga jual hasil panen di pasar tidak selalu sebanding dengan kenaikan biaya tersebut. Hal ini membuat keuntungan petani semakin menipis, bahkan bisa menimbulkan kerugian. Jika keadaan ini terus berlanjut, keberlanjutan usaha tani hortikultura bisa terancam dan dampaknya tidak hanya dirasakan oleh petani saja, tapi juga oleh masyarakat pedesaan yang bergantung pada sektor pertanian.

Selain tekanan biaya, tingginya harga pupuk juga membuat banyak petani mengurangi jumlah pupuk yang mereka gunakan. Hal ini tentu berdampak pada produktivitas tanaman. Masalah lain yang muncul adalah kurangnya perhatian terhadap kondisi dan kebutuhan khusus petani di daerah dataran tinggi, seperti Kejajar. Jadi, ketika kebijakan subsidi didesain dengan pendekatan yang sama untuk semua jenis komoditas, hasilnya bisa menimbulkan kesenjangan antarpetani hortikultura.

Mengingat pentingnya hortikultura bagi perekonomian di Wonosobo, terutama di Kejajar, sudah seharusnya kebijakan subsidi pupuk dievaluasi kembali secara menyeluruh. Evaluasi ini tidak hanya melihat dampak ekonomi jangka pendek, tapi juga perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang, seperti keberlanjutan pertanian dan kesejahteraan petani. Pendekatan yang lebih menyeluruh akan membantu menyusun kebijakan yang tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga adil dan tepat sasaran.

Oleh karena itu, penelitian mengenai dampak kebijakan subsidi pupuk di Kecamatan Kejajar sangat penting dilakukan. Hasil kajian ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah maupun pusat dalam merumuskan kebijakan yang lebih berpihak pada petani hortikultura sesuai dengan kondisi daerah dan potensi unggulannya. Harapannya, kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan ini bisa memperkuat ketahanan pangan lokal, menjaga kelangsungan usaha tani, dan meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah dataran tinggi seperti Kejajar.

1.9. Metode Penelitian

1.9.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Auerbach & Silverstein (dalam Sugiyono, 2018), metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada analisis serta interpretasi terhadap teks dan hasil wawancara, dengan tujuan mengungkap makna dari sebuah fenomena. Sementara itu, pendekatan deskriptif, merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh (Restu, 2021: 17)

Data yang diperoleh dalam metode ini merupakan data kualitatif yang memerlukan interpretasi lebih lanjut agar maknanya dapat dipahami secara mendalam. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dampak kebijakan subsidi pupuk dan mengidentifikasi apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dampak kebijakan subsidi pupuk di Kecamatan Kejajar.

1.9.2. Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk mengamati dan memahami secara langsung kondisi nyata dari objek yang diteliti, dengan tujuan memperoleh data atau informasi yang relevan dan mendukung keperluan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki karakteristik wilayah dengan dominasi pertanian hortikultura, terutama sebagai sentra produksi kentang, serta didukung oleh kondisi demografis yang menunjang

aktivitas pertanian. Selain itu, terdapat indikasi bahwa kebijakan subsidi pupuk berpengaruh terhadap produktivitas dan kesejahteraan petani di daerah ini. Penelitian ini juga dilakukan karena belum ada kajian sebelumnya yang secara spesifik meneliti dampak kebijakan subsidi pupuk di Kecamatan Kejajar.

1.9.3. Subjek Penelitian

Penelitian kualitatif selalu melibatkan subjek penelitian secara langsung. Menurut Herdiansyah (dalam Ghony, M.D. & Almanshur, F., 2012) subjek penelitian merujuk pada individu yang mengalami suatu peristiwa atau fenomena secara langsung, bukan sekadar seseorang yang memperoleh informasi tentang fenomena tersebut melalui sumber sekunder atau media lainnya. Subjek penelitian sering disebut sebagai informan, yakni individu yang memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi dalam konteks penelitian (Ghony, M.D. & Almanshur, F., 2012: 146).

Informan dalam penelitian ini, dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Arikunto (dalam Lenaini, I, 2021), teknik ini tidak didasarkan pada prinsip acak, wilayah, atau stratifikasi, melainkan pada pertimbangan tertentu yang berorientasi pada tujuan penelitian. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan tingkat pemahaman mereka terhadap objek yang diteliti, sehingga data yang diperoleh lebih relevan dan mendalam. Oleh karena itu, total informan yang menjadi subjek penelitian ini adalah 7 orang dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.4. Informan Penelitian

No.	Subjek Penelitian	Jumlah Informan	Keterangan
1.	Petani Hortikultura penerima Pupuk Bersubsidi	2	Petani cabai/bawang merah yang menerima alokasi subsidi pupuk di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.
2.	Petani Hortikultura nonpenerima Pupuk Bersubsidi	2	Petani kentang/kubis/wortel yang tidak termasuk dalam komoditas bersubsidi di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.
3.	Agen resmi Kios Pupuk Bersubsidi	1	Pengecer/Agen Kios Pupuk Bersubsidi di wilayah Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.
4.	Koordinator Badan Penyuluhan Pertanian	1	Pendamping teknis petani yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaporan pupuk di Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.
5.	Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura atau yang bisa ditemui	1	Pegawai Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan yang menangani bidang hortikultura Kabupaten Wonosobo.

Sumber: Penulis, 2025.

Berdasarkan tabel di atas, terdapat tujuh orang informan yang dibedakan menjadi lima kategori. Informan tersebut dipilih secara sengaja untuk memperoleh data yang mendalam dan komprehensif dari berbagai perspektif pelaku di lapangan,

baik sebagai penerima manfaat maupun pelaksana kebijakan. Petani Hortikultura dijadikan sebagai informan karena kelompok tersebut terdampak oleh adanya kebijakan subsidi pupuk, sedangkan agen pupuk dan koordinator BPP memberikan gambaran teknis terkait distribusi serta tantangan implementasi di lapangan. Sementara itu, informan dari dinas pertanian memberikan informasi pada level kebijakan dan koordinasi antarinstansi.

1.9.4. Jenis Data

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, sehingga data yang digunakan berbentuk narasi, gambar, dan bukan data numerik. Data tersebut diperoleh melalui transkrip wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Wonosobo atau yang bisa ditemui, serta Koordinator Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Kejajar. Selain itu, wawancara juga melibatkan agen resmi Pupuk Bersubsidi Kecamatan Kejajar, dua Petani Hortikultura yang membudidayakan komoditas penerima subsidi pupuk dan dua Petani Hortikultura yang membudidayakan komoditas non subsidi pupuk.

1.9.5. Sumber Data

Arikunto (dalam Fadilla & Wulandari, 2023) mendefinisikan sumber data dalam penelitian sebagai subjek yang menjadi asal diperolehnya data. Berdasarkan teknik pengumpulannya, data diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber utama. Teknik pengumpulan data primer dapat dilakukan

melalui wawancara, observasi, atau diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion*). Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dalam kondisi alami (*natural setting*), dengan sumber data utama yang diperoleh melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Sugiyono, 2018: 271). Adapun data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan para informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Sumber data sekunder dapat mencakup buku, laporan, jurnal, serta sumber lainnya. Pengumpulan data sekunder umumnya dilakukan melalui teknik observasi atau dokumentasi (Fadilla & Wulandari, 2023). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari artikel ilmiah, jurnal, artikel berita, publikasi pemerintah, dan situs internet.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (Fadilla & Wulandari, 2023). Pengumpulan data dapat dilakukan melalui teknik, berikut:

1. Observasi

Menurut Semiawan (dalam Fadilla & Wulandari, 2023), observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lapangan. Teknik ini mengharuskan peneliti untuk mengamati berbagai aspek yang berkaitan dengan lokasi, individu, aktivitas, objek, waktu, peristiwa, tujuan, serta respons emosional (Ghony, M.D. & Almanshur, F., 2012: 165). Namun, tidak semua aspek

perlu diamati, melainkan hanya elemen yang memiliki relevansi tinggi dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Peneliti dalam penelitian ini, menerapkan observasi partisipatif di lokasi penelitian, yaitu Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2018: 273), menjelaskan bahwa dalam observasi partisipatif, peneliti tidak hanya mengamati tindakan seseorang, tetapi juga mendengarkan perkataan mereka serta terlibat dalam aktivitas yang berlangsung.

2. Wawancara

Esterberg (dalam Sugiyono, 2018: 279-280) mendefinisikan wawancara sebagai interaksi antara dua individu yang bertujuan untuk bertukar informasi dan gagasan melalui proses tanya jawab, sehingga memungkinkan terbentuknya pemahaman mengenai suatu topik tertentu.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan subjek penelitian di lokasi penelitian dengan bantuan alat-alat, seperti buku catatan, *tape recorder*, dan kamera. Peneliti menggunakan metode wawancara semi-terstruktur, yang termasuk dalam kategori *in-depth interview*. Metode ini lebih fleksibel dibandingkan wawancara terstruktur, memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap isu yang diteliti. Tujuan utama dari wawancara semi-terstruktur adalah untuk mengidentifikasi permasalahan secara lebih terbuka, sehingga informan dapat mengungkapkan pandangan dan gagasannya secara bebas. Selama wawancara, peneliti harus mendengarkan dengan cermat serta mencatat informasi yang disampaikan oleh informan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif (Sugiyono, 2018: 280).

3. Dokumentasi

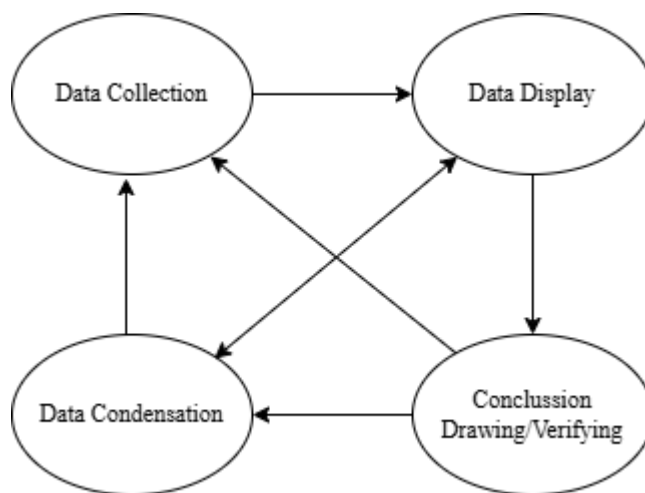
Dokumen merupakan rekaman tertulis mengenai suatu peristiwa yang telah terjadi. Dokumen dapat berwujud teks, gambar, atau karya monumental yang dihasilkan oleh individu. Dalam penelitian kualitatif, studi dokumen berperan sebagai metode tambahan yang melengkapi observasi dan wawancara untuk memperkaya serta memperkuat temuan penelitian (Sugiyono, 2018: 289).

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan beberapa dokumen, mencakup: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi; BPS, Kecamatan Kejajar dalam Angka 2024; BPS Wonosobo, Kabupaten Wonosobo dalam Angka 2024; BPS Wonosobo, Statistik Pertanian Hortikultura Kabupaten Wonosobo 2023; BPS Wonosobo, Hasil Sensus Pertanian 2023 Kecamatan Kejajar.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan proses penyusunan sistematis terhadap data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan cara mengorganisasikannya ke dalam kategori, mengidentifikasi pola, serta menyusun kesimpulan agar lebih mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, analisis data bersifat induktif, yaitu mengembangkan hipotesis berdasarkan temuan awal, kemudian melakukan pengujian secara berulang hingga diperoleh kesimpulan yang valid (Sugiyono, 2018: 293).

Peneliti dalam penelitian ini, menerapkan model analisis data Miles & Huberman (1984), yang menekankan bahwa proses analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga mencapai kejenuhan data. Proses ini berlangsung terus-menerus hingga seluruh data yang diperlukan telah terkumpul dan dianalisis secara menyeluruh, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1.5. Komponen dalam Analisis Data Kualitatif/Model Interaktif

Sumber: Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 2018: 304).

1. *Data Collection/Pengumpulan Data*

Pengumpulan data, yaitu proses awal dalam memperoleh data lapangan yang relevan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, atau kombinasi dari ketiganya menggunakan teknik triangulasi. Data yang dikumpulkan mencakup segala sesuatu yang dilihat, didengar, dan diamati oleh peneliti di lapangan. Pengumpulan data tidak hanya berlangsung sekali, melainkan secara terus menerus hingga data dianggap mencukupi.

2. *Data Condensation/Kondensasi Data*

Tahap kedua, yaitu kondensasi data yang mencakup proses penyaringan, pemfokusan, penyederhanaan, serta pembuatan abstraksi dari data yang diperoleh melalui catatan lapangan, wawancara, transkrip, dan berbagai dokumen. Proses ini dilakukan sejak awal penelitian dan terus berlanjut hingga akhir penelitian, termasuk melalui kegiatan memberi kode (*coding*), kategorisasi, dan pemaknaan data. Data yang dikondensasi akan memudahkan peneliti dalam menginterpretasi temuan secara lebih mendalam.

3. *Data Display/Penyajian Data*

Setelah proses kondensasi data, tahap berikutnya adalah menyajikan data. Tahap ini bertujuan untuk menampilkan data yang telah diolah dalam bentuk yang sistematis agar peneliti dapat memahami pola, hubungan, serta kecenderungan yang muncul dari data. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti ringkasan naratif, diagram, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan representasi visual lainnya.

4. *Conclusion Drawing/Verification*

Tahap terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, merupakan tahap di mana peneliti menginterpretasikan makna dari data yang telah dikondensasi dan disajikan. Kesimpulan awal yang ditarik bersifat sementara dan harus terus diuji kembali selama proses pengumpulan dan analisis data berlangsung. Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh memiliki dasar yang kuat dan tidak semata-mata merupakan interpretasi sepihak. Ketika kesimpulan

awal tetap konsisten seiring dengan bertambahnya data dan hasil triangulasi, maka kesimpulan tersebut dianggap kredibel (Sugiyono, 2018: 295-304).

1.9.8. Kualitas Data

Data dalam penelitian kualitatif, dianggap valid jika tidak terdapat perbedaan antara hasil yang dilaporkan oleh peneliti dengan kondisi nyata dari objek yang diteliti. Adapun kredibilitas data dapat dilakukan dengan menggunakan metode triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan data melalui berbagai sumber, teknik, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

Validitas data diuji dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber untuk memastikan konsistensi dan keakuratan temuan.

2. Triangulasi Teknik

Kredibilitas data diuji dengan menggunakan teknik berbeda pada sumber yang sama, seperti membandingkan hasil wawancara dengan observasi atau dokumentasi.

3. Triangulasi Waktu

Pengujian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, atau metode lain dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk melihat stabilitas informasi yang diperoleh (Sugiyono, 2018: 295-304).

Penelitian ini menelaah dampak kebijakan subsidi pupuk dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti petani, penyuluh pertanian, dan pejabat dinas pertanian. Sebagai upaya memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh, penelitian ini menggunakan metode triangulasi sumber, yaitu dengan

membandingkan pandangan dari berbagai informan. Data diperoleh dari petani sebagai penerima manfaat, penyuluh pertanian sebagai pelaksana kebijakan, serta dokumen resmi yang menjadi dasar pelaksanaan program. Selain itu, digunakan juga triangulasi teknik untuk memastikan keabsahan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumen.